

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin Tahun 2020 merupakan rancangan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan di dalam dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Badan Keuangan Daerah yang disusun ini mencakup analisis gambaran pelayanan Badan Keuangan Daerah dan hasil evaluasi Renja Badan Keuangan Daerah tahun lalu .

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;
- i. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
- j. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ; (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7) ;
- k. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
- l. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan dan pembangunan Daerah yang mengacu pada RKPD Kota Banjarmasin tahun 2019 dan bahan pedoman pada Revisi Renstra tahun 2016-2021. Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bakeuda Kota Banjarmasin dalam melaksanakan target dan fungsinya selama tahun 2020.

Berpijak dari maksud tersebut maka tujuan penyusunan pajak Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 adalah sbb :

- a. Sebagai acuan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Kota Banjarmasin
- b. Menerapkan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019
- c. Memberikan pedoman dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019
- d. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Banjarmasin

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin periode tahun 2018 dan perkiraan realisasi target kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2019. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Banjarmasin merupakan Dokumen Perencanaan yang dikerjakan selama satu tahun dan meliputi penjabaran perencanaan tahun 2020 rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Pada APBD murni tahun anggaran 2018, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin melaksanakan 5 program dengan 32 kegiatan, setelah APBD Perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan juga sebanyak 5 program dengan 32 kegiatan. Pagu belanja langsung yang dikelola Badan Keuangan Daerah untuk APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp. 13.882.629.000,- dan di APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp. 15.821.759.000,-



Sampai dengan akhir Tahun 2018 realisasi keuangan seluruh kegiatan pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin sebesar Rp. 14.112.373.241,- atau 89,20 %, dan realisasi fisiknya mencapai 97,60% dan menyisakan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.709.385.759,-

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1 Tabel T-C 29
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dan
 Pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin s/d Tahun 2018
 Kota Banjarmasin

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dukungan Administrasi Perkantoran Untuk Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	100%	99,05%	99,05%	100%	96,73%	96,73%
1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	100%	100%
1.2	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
1.3	Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan Evaluasi dalam daerah	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kondidi Sarana Prasarana Aparatur Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
2.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Fasilitas dan Prasarana Kantor	-	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor dan Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
2.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin PNS SKPD	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	150 stel	150 stel	150 stel	150 stel	100%	150 stel	150 stel	100%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Sesuai dengan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang di susun	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	11 dokumen	100%
4.2	Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan	Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD,Laporan Realisasi	1200 buku	1200 buku	1200 buku	1200 buku	100%	1200 buku	1200 buku	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	Daerah	Pendapatan Daerah, Laporan Realisasi Pajak								
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1	Asestensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya	6 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
5.3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Draft Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2018								
5.4	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD,RAPBD-P,Nota Pengantar,Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	6 dokumen	100%
5.5	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100%
5.6	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)	Persentase Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Pengelolaan Belanja Pegawai	Persentase Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.8	Pembinaan Penatausahaan dan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	Pengelolaan Keuangan Daerah	dan Verifikator								
5.9	Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Laporan Kas Per Periode	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.10	Penyusunan Rancangan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD,RAPBD,Nota Pengantar,Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
5.11	Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
5.12	Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD	Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan serta Perda APBD,Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	Perubahan									
5.13	Penyusunan Pedoman RKA	Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
5.14	Rekonsiliasi Aset Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Daerah	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
5.15	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemko Banjarmasin dan Plang Pagar	10 persil,20 plang papan informasi	10 persil,20 plang papan informasi	10 persil,20 plang papan informasi	10 persil,20 plang papan informasi	100%	10 persil,20 plang papan informasi	10 persil,20 plang papan informasi	100%
5.16	Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD,RKPBMD,DKBMD,D KPBMD,Daftar Hasil Pengadaan ,Daftar Hasil Pemeliharaan ,Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
5.17	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-	Terdatanya Jumlah Objek Pajak Daerah	140 wp	4206	140 wp	140 wp	100%	140 wp	140 wp	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	Sumber Pendapatan Daerah									
5.18	Penguatan Pengelolaan Data PBB	Jumlah Validasi Wajib Pajak PBB	2000 op	n/a	2000 op	2000 op	100%	2000 op	2000 op	100%
5.19	Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB	Jumlah Penerimaan PBB Yang Optimal	25 M	25 M	20 M	20 M	100%	25 M	25 M	100%
5.20	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain	Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak yang Melakukan Tunggakan Pajak Daerah Serta Pajak Lainnya	40 wp	40 wp	15 wp	15 wp	100%	40 wp	40 wp	100%
5.21	Rekonsiliasi dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah	Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Daerah	10 wp	87 wp	10 wp	10 wp	100%	10 wp	10 wp	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.22	Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB	Tervalidasi nya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB	30 M	722.000.000	30 M	30 M	100%	30 M	30 M	100%
5.23	Pemanfaatan dan Penilaian Aset Milik Daerah	Tersedianya Data Aset Milik Pemko Ynag di Kuasai Pihak Lain dan Yang di Kerjasamakan	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	dokumen	dokumen	100%
5.24	Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa	Tersedianya DokumenASB dan SSH Sebagai Bahan Penyusunan RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
6	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai perda nomor 1 Tahun 2017)	50%	n/a	n/a	n/a	n/a	50%	50%	100%
6.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%



Dari tabel 2.1 diatas didapat beberapa informasi mengenai antara lain :

1. Program di tahun 2018 yang memenuhi target kinerja yang direncanakan ada sebanyak 2 (Dua) program yaitu
 - a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2. Kegiatan di tahun 2018 yang memenuhi target kinerja yang direncanakan ada sebanyak 29 kegiatan yaitu
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
 - Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
 - Pengelolaan Belanja Pegawai
 - Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
 - Penyusunan Rancangan APBD
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)
 - Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - Asistensi Penyusunan RKA
 - Penyusunan Peraturan Daerah APBD / APBD Perubahan dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD / APBD Perubahan
 - Pengelolaan Penerimaan Dan Validasi SSPD BPHTB
 - Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin
 - Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah
 - Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB
 - Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah



-
- Rekonsiliasi Aset Milik Daerah
 - Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - Rekonsiliasi Dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah
 - Pengelolaan Kas Daerah
 - Penyusunan Analisis Standar Belanja Dan Standar Satuan Harga
3. Program di tahun 2018 yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan ada sebanyak 3 (Tiga) program yaitu
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian sebesar 88,40 %
 - 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan capaian sebesar 95,16%
 - 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian sebesar 88,32 %
4. Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan ada sebanyak 5 (Lima) kegiatan yaitu
- Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah dengan capaian sebesar 73,93%
 - Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah dengan capaian sebesar 94,69 %
 - Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin dengan capaian sebesar 82,48 %
 - Penguatan Pengelolaan Data PBB dengan capaian sebesar 84,76 %
 - Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber - Sumber Lain dengan capaian sebesar 86,16 %
5. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya program dan kegiatan yaitu :
- Adanya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak ter realisasi 100 persen di karena kan belanja ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada belanja Cetak, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman kegiatan yang juga sesuai kebutuhan.
 - Wajib Pajak masih belum memiliki surat kepemilikan tanah yang sah atau sertifikat.
 - Hasil Pendataan ulang tidak maksimal karena Kurang nya respon masyarakat terhadap Penadataan ulang PBB P2.



6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

- Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dengan benar dan lebih cermat lagi sesuai dengan kebutuhan kegiatan
- Melaksanakan rapat rutin untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan (Evaluasi Kegiatan)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari perencanaan umum yaitu penyusunan Renstra, Renja, KUA-PPAS, RKT, PK dan secara khusus yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, memiliki dua peran yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal dan bagaimana meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin seperti Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kota Banjarmasin**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Laporan Keuangan yang akuntabel	-	-	100%	100%	100%	100%	90,62%	64,71%	70%	75%	-
2	Rasio Derajat Desentralisasi	-	-	35%	35%	35%	35%	21,94%	80%	90%	95%	-
3	Rasio Kemandirian Daerah	-	-	35%	35%	35%	35%	25,86	90.12%	100%	100%	-



No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Persentase Peningkatan Potensi PAD dari sektor Pajak	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	23,79	23	25	
5	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	85%	
6	Persentase Pengaduan yang terselesaikan		-	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-
7	Persentase Penurunan Piutang Pajak Daerah		70%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-
8	Penyusunan RAPBD yang tepat waktu		90%	perda	perda	-	-	perda	-	-	-	-
9	Persentase kesesuaian program kegiatan antara KUA PPAS dan RAPBD		60%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-
10	Persentase program daerah yang selaras dengan			100%	100%			100%				



No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	program Nasional dan Propinsi											
11	Persentase pelaporan dana Transfer tepat waktu			100%	100%			100%				
12	Persentase ketersediaan dana di kas Daerah			100%	100%			100%				
13	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu			100%	100%			100%				
14	Jumlah Rancangan Perda Pertanggung jawaban APBD			Perda	Perda			Perda				
15	Jumlah Rancangan Perda Pertanggung jawaban Keuangan Tepat Waktu			Perda	Perda			Perda				
16	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang			100%	100%			100%				



No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	tepat dan Benar											
17	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Tepat Waktu			100%	100%			100%				
18	Persentase aset yang tercatat sesuai ketentuan			100%	100%			100%				
19	Persentase peningkatan Pencatatan Barang milik Daerah			100%	100%			100%				

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Badan Keuangan Daerah memiliki lingkup pelayanan yang luas. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, memiliki dua peran yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal dan bagaimana meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Tantangan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Adanya laporan dari publik atau masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan Bakeuda;



2. Terbatasnya ruang kerja sehingga kurang mendukung dalam melakukan aktivitas kerja secara optimal.
3. Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip dan gudang.
4. Terbatasnya penganggaran keuangan daerah untuk membiayai bimtek, diklat atau pelatihan lainnya.
5. Sering terdapat perubahan peraturan yang terkait dengan SAP
6. Belum optimal/terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM pengelola keuangan dan aset daerah di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
7. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak Daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Daerah, merupakan tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran yang dimaksud.
8. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Banjarmasin telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan prestasi pada tahun-tahun yang akan datang.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin ini antara lain :

1. Diterapkannya Permendagri 86 Tahun 2017 yang memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan;
2. Cukup banyaknya Aset Daerah, meskipun sementara ini masih dalam kategori *idle*, namun merupakan peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah
3. Dukungan regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam upaya - upaya peningkatan Pendapatan Daerah maupun Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.
4. Adanya teknologi informasi yang mudah di akses.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah didukung oleh SDM yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup tinggi, anggaran yang cukup dan sarana serta prasarana yang relatif memadai. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah antara lain :

1. Belum optimalnya Fasilitasi Keuangan terhadap BUMD;
2. Sumbangan PAD terhadap APBD masih belum optimal ;



3. Pengelolaan Barang Milik Daerah / aset dan kekayaan yang di miliki Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum Optimal;
4. Kualitas Pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi (IT) belum di dukung sepenuhnya dengan ketersediaan sarana dan prasarana (tools) serta sistem prosedur yang memadai;

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian sasaran daerah serta visi dan misi Kepala Daerah. Untuk itu diharapkan peran serta aktif semua pihak agar di tahun 2020 permasalahan-permasalahan tersebut sudah mulai berkurang. Adapun isu-isu yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2020 adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan yang harus dilaksanakan sebelum proses perencanaan. Karena sekarang di Pemerintah Kota Banjarmasin sudah diberlakukan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berbasis Kinerja Hal ini perlu menjadi perhatian karena hasil monitoring dan evaluasi diperlukan dalam proses perencanaan.
2. Penyusunan dokumen perencanaan secara tepat waktu yang mempertimbangkan hasil dari dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka untuk meraih capaian target yang sudah ditetapkan di RPJMD dan RKPD
4. Peningkatan kapasitas aparatur SDM Badan Keuangan Daerah yang harus ditingkatkan khususnya dalam bidang perencanaan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Banjarmasin

RKPD tahun 2020 Kota Banjarmasin merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021. Untuk RKPD tahun 2020 adalah RKPD Tahap IV berjalan pada RPJMD Kota Banjarmasin.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dihasilkan dari rapat-rapat intern Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Berdasarkan review dan analisis kebutuhan pada rancangan awal program/kegiatan tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pagu indikatif Program/kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dengan yang direncanakan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016-2021.



Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dan di Revisi Renstra Tidak ada merencanakan kegiatan Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor namun setelah dilakukan analisis kebutuhan kegiatan ini masih dianggarkan di tahun 2020. Itu disebabkan adanya kebutuhan akan Renovasi Gedung Kantor seperti merehab Atap dan menyekat ruangan untuk digunakan sebagai ruang kerja bagi ASN Bakeuda.

Tabel review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dapat dilihat selengkapnya pada tabel 2.3. berikut



Tabel TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Banjarmasin

Nama SKPD : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Bjm	Persentase dukungan administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	3,974,623,000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Bjm	Persentase dukungan administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	3.930.880.000	
1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bjm	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 laporan	1,739,558,950	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bjm	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 Laporan	2.065.800.000	
2	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bjm	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,897,690,050	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bjm	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.825.080.000	
3	Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Bjm	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	1 laporan	337,374,000	Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Bjm	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	1 laporan	40.000.000	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Bjm	Persentase kondisi sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	100%	1,327,640,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Bjm	Persentase kondisi sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	100%	3.440.558.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Bjm	fungsi SKPD dengan baik Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kantor dan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	751,472,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Bjm	fungsi SKPD dengan baik Persentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kantor dan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	1.208.303.000	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bjm	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang sesuai dengan perencanaan	100%	576,168,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bjm	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yang sesuai dengan perencanaan	100%	1.632.255.000	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Bjm	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor	-	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Bjm	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor	100%	600.000.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Bjm	Persentase Tingkat Disiplin PNS SKPD	100%	85,161,000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Bjm	Persentase Tingkat Disiplin PNS SKPD	100%	55.300.000	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Bjm	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	150 stel	85,161,000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Bjm	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	150 stel	55.300.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pening
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Bjm	Persentase capaian kinerja dan keuangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	188,860,000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Bjm	Persentase capaian kinerja dan keuangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	192.680.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Bjm	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang disusun	11Dokumen	13,860,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Bjm	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	11 Dokumen	19.200.000	
2	Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah	Bjm	Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD,Lap.Realisasi Pendapatan Daerah,Lap.Realisasi Pajak	1200 Buku	175,000,000	Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah	Bjm	Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD,Lap.Realisasi Pendapatan Daerah,Lap.Realisasi Pajak	1200 Buku	173.480.000	
V	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bjm	Persentase Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	11,427,965,000	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bjm	Persentase Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	8.822.265.000	
1	Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Bjm	Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD	4 Kali	1,404,589,000	Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Bjm	Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD	29 SKPD	463,580,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin	Bjm	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit Beserta Lampirannya	6 Dokumen	476,575,000	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin	Bjm	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit Beserta Lampirannya	6 Dokumen	168.940.000	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bjm	Draf Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD Pemerintah Kota Banjarmasin	5 Dokumen	210,812,500	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bjm	Draf Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD Pemerintah Kota Banjarmasin	5 Dokumen	116.490.000	
4	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Bjm	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan	6 Dokumen	259,112,500	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Bjm	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan	6 Dokumen	131.100.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Rancangan Penjabaran APBD Perubahan					Rancangan Penjabaran APBD Perubahan			
5	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin	Bjm	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin	5 Dokumen	204,260,500	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin	Bjm	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin	5 Dokumen	106.690.000	
6	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)	Bjm	Persentase Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin	100%	639,768,500	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)	Bjm	Persentase Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin	100%	527.658.000	
7	Pengelolaan Belanja Pegawai	Bjm	Persentase Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin	100%	322,270,000	Pengelolaan Belanja Pegawai	Bjm	Persentase Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin	100%	212.640.000	
8	Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bjm	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator	2 Kali	221,592,500	Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bjm	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator	2 Kali	119.090.000	
9	Pengelolaan Kas	Bjm	Persentase	100%	277,560,000	Pengelolaan Kas Daerah	Bjm	Persentase Laporan Kas	100%	98.300.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah		Laporan Kas Per Periode					Per Periode			
10	Penyusunan Rancangan APBD	Bjm	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD,RAPBD,Nota Pengantar,Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD	6 dokumen	271,397,500	Penyusunan Rancangan APBD	Bjm	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD,RAPBD,Nota Pengantar,Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD	6 dokumen	211.650.000	
11	Asistensi Penyusunan RKA	Bjm	Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin	2 Kali	127,705,000	Asistensi Penyusunan RKA	Bjm	Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin	2 Kali	305.050.000	
12	Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan	Bjm	Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni	6 Dokumen	209,400,000	Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan	Bjm	Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni	6 Dokumen	240.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Penyusunan Pedoman RKA	Bjm	Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD	2 Dokumen	119,734,000	Penyusunan Pedoman RKA	Bjm	Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD	2 Dokumen	82.900.000	
14	Rekonsiliasi Aset Milik Daerah	Bjm	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Daerah	2 Kali	524,650,000	Rekonsiliasi Aset Milik Daerah	Bjm	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Daerah	2 Kali	171.450.000	
15	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Bjm	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar	10 persil, 20 plang papan informasi 2 kali (per 6 bln)	803,743,000	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Bjm	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar	10 persil, 20 plang papan informasi 2 kali (per 6 bln)	1.899.793.000	
16	Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah	Bjm	Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBM, DKBMD, DKBMD, DKBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah	8 Dokumen	269,360,000	Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah	Bjm	Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBM, DKBMD, DKBMD, DKBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah	8 Dokumen	156.000.000	
17	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber	Bjm	Terdatanya Jumlah Objek Pajak Daerah	140 WP	499,675,000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber	Bjm	Terdatanya Jumlah Objek Pajak Daerah	140 WP	548.900.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendapatan Daerah					Pendapatan Daerah					
18	Penguatan Pengelolaan Data PBB	Bjm	Jumlah Validasi Wajib Pajak PBB	2000 OP	2,457,200,000	Penguatan Pengelolaan Data PBB	Bjm	Jumlah Validasi Wajib Pajak PBB	2000 OP	891.544.000	
19	Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB	Bjm	Jumlah Penerimaan PBB yang Optimal	25 M	770,000,000	Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB	Bjm	Jumlah Penerimaan PBB yang Optimal	25 M	843.310.000	
20	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain	Bjm	Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak Yang Melakukan Tunggakan Pajak Daerah Serta Pajak Lainnya	40 WP	250,000,000	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain	Bjm	Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak Yang Melakukan Tunggakan Pajak Daerah Serta Pajak Lainnya	40 WP	615.840.000	
21	Rekonsiliasi dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah	Bjm	Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Daerah	10 WP	373,300,000	Rekonsiliasi dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah	Bjm	Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Daerah	10 WP	97.700.000	
22	Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB	Bjm	Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB	30 M	350,000,000	Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB	Bjm	Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB	30 M	484.840.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Pemanfaatan dan Penilaian Aset Milik Daerah	Bjm	Tersedianya Data Aset Milik Pemko Yang di Kuasai Pihak Lain dan Yang di Kerjasamakan	Dokumen	185,260,000	Pemanfaatan dan Penilaian Aset Milik Daerah	Bjm	Tersedianya Data Aset Milik Pemko Yang di Kuasai Pihak Lain dan Yang di Kerjasamakan	Dokumen	43.800.000	
24	Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Bjm	Tersedianya Dokumen ASB dan SSH Sebagai Bahan Penyusun RKA SKPD	2 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Bjm	Tersedianya Dokumen ASB dan SSH Sebagai Bahan Penyusun RKA SKPD	1 Dokumen	285.000.000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Bjm	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai perda nomor 1tahun 2017)	50%	126,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Bjm	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar (dari total 50 juta sesuai perda nomor 1tahun 2017)	50%	170.000.000	
1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bjm	Jumlah Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	126,000,000	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bjm	Jumlah Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	170.000.000	
TOTAL					17,130,249,000	TOTAL					16.611.683.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Badan Keuangan Daerah juga didiskusikan dalam pembahasan forum gabungan SKPD Kota Banjarmasin. Pembahasan dilakukan untuk menelaraskan rumusan rancangan awal Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota di tingkat kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Keuangan Daerah selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD lain. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal. Arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan perencanaan yaitu dalam hal penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Dimana salah satu bentuknya adalah proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, tepat guna, tepat sasaran dan transparan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 merupakan penjabaran dari misi ke-4 dan ke-5 yang tercantum pada RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2016-2021 yaitu

Misi ke-4 "Mewujudkan Kota Banjarmasin yang Maju dengan Penguatan Perekonomian Melalui Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Pelabuhan dengan memperhatikan Pemerataan Pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangandan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"

Misi ke-5 "Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME"

Berdasarkan keterkaitan antara tugas pokok Badan Keuangan Daerah dengan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 maka tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah

1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatkan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah.



Dari tujuan yang ada tersebut kemudian ditetapkan sasaran dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Derajat Desentralisasi.
3. Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	11.427.965.000			100 %	8.822.265.000
1.1	Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD	Badan Keuangan Daerah	4 Kali	463.580.000	APBD	-	4 Kali	1.404.589.000
1.2	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya	Badan Keuangan Daerah	6 Dokumen	168.940.000	APBD	-	6 Dokumen	476.575.000
1.3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Draf Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD Pemerintah Kota Banjarmasin	Badan Keuangan Daerah	5 Dokumen	116.490.000	APBD	-	5 Dokumen	210.812.500
1.4	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin	Badan Keuangan Daerah	5 Dokumen	106.690.000	APBD	-	5 Dokumen	204.260.500



1.5	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)	Persentase Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin	Badan Keuangan Daerah	100%	527.658.000	APBD	-	100%	639.768.500
1.6	Pengelolaan Belanja Pegawai	Persentase Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin	Badan Keuangan Daerah	100%	212.640.000	APBD	-	100%	322.270.000
1.7	Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator	Badan Keuangan Daerah	2 kali	119.090.000	APBD	-	2 kali	221.592.500
1.8	Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Laporan Kas Per Periode	Badan Keuangan Daerah	100 %	98.300.000	APBD	-	100%	277.560.000
1.9	Penyusunan Rancangan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD	Badan Keuangan Daerah	6 dokumen	211.650.000	APBD	-	6 dokumen	271.397.500
1.10	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan	Badan Keuangan Daerah	6 dokumen	131.100.000	APBD	-	6 dokumen	259.112.500
1.11	Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin	Badan Keuangan Daerah	2 kali	305.050.000	APBD	-	2 kali	127.705.000
1.12	Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni	Badan Keuangan Daerah	6 dokumen	240.000.000	APBD	-	6 dokumen	209.400.000
1.13	Penyusunan Pedoman RKA	Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD	Badan Keuangan Daerah	2 dokumen	82.900.000	APBD	-	2 dokumen	119.734.000



1.14	Rekonsiliasi Aset Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah	2 kali (per 6 bln)	171.450.000	APBD	-	2 kali (per 6 bln)	524.650.000
1.15	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar	Badan Keuangan Daerah	10 persil, 20 plang papan informasi 2 kali (per 6 bulan)	1.899.793.000	APBD	-	10 persil, 20 plang papan informasi	803.743.000
1.16	Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBMMD, DKBMD, DKPBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah	8 dokumen	156.000.000	APBD	-	8 dokumen	269.360.000
1.17	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah	140 WP	548.900.000	APBD	-	140 WP	499.675.000
1.18	Penguatan Pengelolaan Data PBB	Jumlah Validasi Wajib Pajak PBB	Badan Keuangan Daerah	2000 OP	891.544.000	APBD	-	2000 OP	2.457.200.000
1.19	Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB	Jumlah penerimaan PBB yang optimal	Badan Keuangan Daerah	Rp 25M	843.310.000	APBD	-	Rp. 25M	770.000.000
1.20	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain	Tersedianya jumlah data Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak daerah serta pajak lainnya	Badan Keuangan Daerah	40 WP	615.840.000	APBD	-	40 WP	250.000.000
1.21	Rekonsiliasi dan perhitungan Potensi Pajak Daerah	Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah	10 WP	97.700.000	APBD	-	10 WP	373.300.000
1.22	Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB	Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB	Badan Keuangan Daerah	Rp 30M	484.840.000	APBD	-	Rp 30M	350.000.000



1.23	Pemanfaatan dan Penilaian Aset Milik Daerah	Tersedianya Data Aset Milik Pemko Yang di Kuasai Pihak Lain dan Yang di Kerjasamakan	Badan Keuangan Daerah	Dokumen	43.800.000	APBD	-	Dokumen	185.260.000
1.24	Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Tersedianya Dokumen ASB dan SSH Sebagai Bahan Penyusun RKA SKPD	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	285.000.000	APBD	-	2 Dokumen	200.000.000
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Dukungan Administrasi Perkantoran untuk Kelancaran tugas dan Fungsi SKPD		100 %	3.974.623.000			100%	3.930.880.000
2.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Badan Keuangan Daerah	4 laporan	2.065.800.000	APBD	-	4 Laporan	1.739.558.950
2.2	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Keuangan Daerah	100%	1.825.080.000	APBD	-	100%	1.897.690.050
2.3	Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	40.000.000	APBD	-	1 Laporan	337.374.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kondisi sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan baik		100 %	1.327.640.000			100%	3.440.558.000
3.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana Kantor dan Kendaraan Dinas / Operasional	Badan Keuangan Daerah	100%	1.208.303.000	APBD	-	100%	751.472.000
3.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase pengadaan sarana dan Prasarana Kantor yang sesuai dengan perencanaan	Badan Keuangan Daerah	100 %	1.632.255.000	APBD	-	100%	576.168.000
3.3	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor	Badan Keuangan Daerah	-	600.000.000			-	0



4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin PNS SKPD		100 %	85.161.000			100%	55.300.000
4.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus Hari - Hari tertentu	Badan Keuangan Daerah	150 Stel	55.300.000	APBD	-	150 Stel	85.161.000
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja dan Keuangan yang sesuai dengan dokumen perencanaan		100%	188.860.000			100%	192.680.000
5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	Badan Keuangan Daerah	11 Dokumen	19.200.000	APBD		11 Dokumen	13.860.000
5.2	Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.Realisasi Pendapatan Daerah, Laporan Realisasi Pajak	Badan Keuangan Daerah	1200 Buku	173.480.000	APBD		1200 Buku	175.000.000
6.	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Persentase Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Pasar(Dari Total 50 juta sesuai perda nomor 1 Tahun 2017)	Badan Keuangan Daerah	50%	170.000.000			50%	126.000.000
6.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan hasil Analisa Investasi	Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	170.000.000	APBD	-	1 Dokumen	126.000.000
	JUMLAH				16.611.683.000				17.130.249.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada Tahun 2020 rencananya ada 6 program dan 34 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dengan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp 17.130.249.000,- (Tujuh belas milyar seratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh sembilan Ribu Rupiah). Adapun rincian program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif Rp 3.974.623.000,-. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :
 - a) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan pagu indikatif Rp 1.739.558.950,-
 - b) Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif Rp 1.897.690.050,-
 - c) Rapat – Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah dengan pagu indikatif Rp 337.374.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif Rp 1.327.640.000,-. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan pagu indikatif Rp 576.168.000,-
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor dengan pagu indikatif Rp 751.472.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu indikatif Rp 85.161.000,-. Kegiatan yang ada di dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah
 - a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan pagu indikatif Rp 85.161.000,-



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif Rp 188.860.000,-. Kegiatan yang ada di dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD dengan pagu indikatif Rp 13.860.000,-.
 - b) Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah dengan pagu indikatif Rp 175.000.000,-
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu indikatif Rp 11.427.965.000,-. Kegiatan yang ada di dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
 - a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan pagu indikatif Rp 210.812.500,-.
 - b) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah dengan pagu indikatif Rp 499.675.000,-.
 - c) Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin dengan pagu indikatif Rp 204.260.500,-.
 - d) Pengelolaan Belanja Pegawai dengan pagu indikatif Rp 322.270.000,-.
 - e) Penyusunan Rancangan Perubahan APBD dengan pagu indikatif Rp 259.112.500,-.
 - f) Penyusunan Rancangan APBD dengan pagu indikatif Rp 271.397.500,-.
 - g) Penguatan Pengelolaan Data PBB dengan pagu indikatif Rp 2.457.200.000,-.
 - h) Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber - Sumber Lain dengan pagu indikatif Rp 250.000.000,-.
 - i) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD) dengan pagu indikatif Rp 639.768.500,-.
 - j) Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dengan pagu indikatif Rp 1.404.589.000,-.
 - k) Asistensi Penyusunan RKA dengan pagu indikatif Rp 127.705.000,-.



- l) Penyusunan Peraturan Daerah APBD / APBD Perubahan dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD / APBD Perubahan dengan pagu indikatif Rp 209.400.000,-.
 - m) Pengelolaan Penerimaan Dan Validasi SSPD BPHTB dengan pagu indikatif Rp 350.000.000,-.
 - n) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pagu indikatif Rp 476.575.000,-.
 - o) Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah dengan pagu indikatif Rp 803.743.000,-.
 - p) Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB dengan pagu indikatif Rp 770.000.000,-.
 - q) Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu indikatif Rp 221.592.500,-.
 - r) Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu indikatif Rp 269.360.000,-.
 - s) Rekonsiliasi Aset Milik Daerah dengan pagu indikatif Rp 524.650.000,-.
 - t) Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pagu indikatif Rp 119.734.000,-.
 - u) Rekonsiliasi Dan Perhitungan Potensi Pajak dengan pagu indikatif Rp 373.300.000,-.
 - v) Pengelolaan Kas Daerah dengan pagu indikatif Rp 277.560.000,-.
 - w) Penyusunan Analisis Standar Belanja Dan Standar Satuan Harga dengan pagu indikatif Rp 200.000.000,-.
 - x) Pemanfaatan dan Penilaian Aset Milik Daerah dengan pagu indikatif Rp 185.260.000,-.
6. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota dengan pagu indikatif Rp 126.000.000,-. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota antara lain :
- a) Analisis Investasi Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif Rp 126.000.000,-



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah, dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Perencanaan Pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja Tahun 2020 ini mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2017 yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Ini akan diverifikasi untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kota Banjarmasin. Setelahnya diharapkan agar rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini dapat lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Banjarmasin, Maret 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah

H. SUBHAN NOR YAUMIL, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19710421 199803 1 009

